

PENDEKATAN *STUDENT ACTIVE LEARNING* PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SEBAGAI *BEST PRACTISE* UNTUK MEMBENTUK KARAKTER WARGA NEGARA YANG BAIK

Dian Agus Ruchliyadi

PPKn, Universitas Lambung Mangkurat

Email: dianagus@unlam.ac.id, drdianagus@gmail.com

Abstrak: Pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat akan eksis. Di tengah era globalisasi dimana persaingan antar negara semakin ketat, pendidikan merupakan hal yang penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas guna menghadapi era globalisasi itu. PKn sebagai suatu ilmu yang menanamkan nilai-nilai moral, etika dan hukum, tentu memiliki peran yang cukup penting untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi tersebut tanpa kehilangan identitas dan jati diri bangsa. PKn merupakan wahana yang tepat dalam membina moral dan karakter bangsa khususnya peserta didik-peserta didik di persekolahan. PKn sangat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia. PKn berperan untuk membentuk warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan/ versi para penyelenggara negara pada zamannya yang bersifat dogmatis dan relatif. PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara dapat tercapai dengan baik. Dengan pendekatan *Student Active Learning*, peserta didik lebih banyak melakukan eksplorasi daripada secara pasif menerima informasi yang disampaikan oleh guru dan tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja, tetapi juga berkembang keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok, insiatif, berbagi informasi, dan penghargaan terhadap orang lain.

Kata kunci: *student active learning, PKn, SD, Sekolah Menengah, dan karakter warga Negara.*

A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus menjwai semua bidang pembangunan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dicetuskan tujuan negara untuk mengisi kemerdekaannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga merupakan sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk bisa mencapai tujuan tersebut jika nilai-nilai karakter bangsa dapat dipahami, dipertahankan, dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam visi dan misi pembangunan nasional tahun 2005-2025 berdasarkan kondisi bangsa Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang

dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang "mandiri, maju, adil, dan makmur". Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan kekuatan sendiri. Tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin

menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Pembangunan bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang mandiri dan maju, melainkan juga bangsa yang adil dan makmur. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menimati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan nasional.

Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat akan eksis. Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya memujudkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural.

Namun proses membangun karakter dalam perjalanannya tidak dapat terhindarkan dari praktik-praktik indoktrinasi seperti dinyatakan Soedarsono (2002) "namun sayang adanya Tupabi disertai Manipol-Usdek yang dirasakan sebagai indoktrinasi, *character nation building*, terasa menjadi surut. Hal senada diutarakan oleh Wahab (2004) sebagai berikut: "sayang upaya pembangunan karakter bangsa tersebut didominasi oleh pemikiran-pemikiran perorangan (tujuh bahan pokok indoktrinasi) sehingga prosesnya pun cenderung

indoktrinatif".

Di zaman orde baru, Presiden Soeharto meluncurkan suatu gerakan yang sebenarnya bernilai sangat strategis untuk menjadikan manusia Indonesia menjadi manusia Pancasila. Soedarsono (2002), gagasan dan strateginya sangat benar, namun hasilnya dirasakan sangat minim, untuk tidak dikatakan "gagal, mengapa?". Secara substansial Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) adalah baik. Apa yang menjadikan P4 tidak berhasil adalah tidak adanya keteladanan dan *character building* tidak dibuat secara implisit. Apa yang terjadi saat ini adalah tetap maraknya sikap dan perilaku yang tidak terpuji di lapisan bawah maupun di lapisan atas sehingga diperlukan adanya perubahan yang cepat.

Hal lain yang turut mempengaruhi terjadinya dekadensi moral yang berakibat hancurnya karakter bangsa seperti tertundanya proses demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia serta pengaruh lainnya terhadap kehidupan manusia adalah adanya pengaruh globalisasi yang kian deras melanda negara-negara di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Branson (1999) menyatakan bahwa "*Globalization and its potential for advancing or inhibiting human right and democracy is more than a subject for debate among academics. This powerfull force is affecting the lives of individuals no matters where in this earth they live*".

Syam (2006: 1) menyatakan bahwa dalam era reformasi Indonesia mengalami tantangan dan himpitan secara nasional dan global dari: neo-liberalisme, neo-kapitalisme, neo-imperialisme...dan neo-komunisme...! Bila rakyat Indonesia sebagai manusia maupun sebagai bangsa tidak menghadapi tantangan ini dengan semangat **wawasan nasional**, yang dijiwai filsafat hidup (*Weltanschauung*) filsafat Pancasila...yang **beridentitas theisme-religious**...maka bangsa dan NKRI akan menjadi obyek kekuasaan mereka! Lebih-lebih euforia reformasi yang **memuja kebebasan**...termasuk kebebasan "berideologi", maka sesungguhnya rakyat Indonesia secara tidak sadar sedang menuju degradasi dan keruntuhan sebagai bangsa dengan ideologi nasional Pancasila.

Tantangan itu antara lain berupa tantangan nasional (internal) dan internasional (eksternal), terutama proses

degradasi wawasan nasional sebagai dampak globalisasi-liberalisasi; dinamika modernisasi yang makin melanda manusia sebagai bagian dari pascamodernisme, kecenderungan memuja kebebasan demi kebebasan; pemujaan individualisme atas nama HAM berdasarkan asas liberalisme...**bukan**: berdasarkan sistem filsafat dan pandangan hidupnya (*Weltanschauung*) sebagai bangsa dan negara!...Akibatnya sebagian warga negara kita tergoda dan terlinda, sehingga mengalami erosi ideologi; dinamika globalisasi-liberalisasi yang sesungguhnya digerakkan oleh hegemoni-supremasi politik AS sebagai negara adi daya yang memprogandakan keunggulan (supremasi) paham politik kapitalisme-liberalisme (yang berwatak: individualisme, materialisme, dan sekularisme); juga adanya fenomena kebangkitan marxisme-komunisme, melalui gerakan neo-komunisme...khususnya dalam NKRI...dengan memutarbalikkan sejarah G30 S/PKI. Watak ideologi marxisme-komunisme: menegakkan kolektivisme, **kedaulatan negara** (pemujaan kepada negara= etatisme), materialisme, totalitarianisme...dan **atheisme!** (Noor Syam, 2006: 1).

a. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangun Karakter Warga Negara

Untuk membina sikap mental generasi muda ini diantaranya adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn merupakan wahana yang tepat dalam membina moral dan karakter bangsa khususnya peserta didik-peserta didik di persekolahan. PKn sangat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia. PKn berperan untuk membentuk warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan/ versi para penyelenggara negara pada zamannya yang bersifat dogmatis dan relatif.

Di tengah era globalisasi dimana persaingan antar negara semakin ketat, pendidikan merupakan hal yang penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas guna menghadapi era globalisasi itu. PKn sebagai suatu ilmu yang menanamkan nilai-nilai moral, etika dan hukum, tentu memiliki peran yang cukup penting untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi dampak negatif dari

globalisasi tersebut tanpa kehilangan identitas dan jati diri bangsa.

Pendidikan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN No. 20/2003), adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan fungsinya, UUSPN No. 20/2003 tersebut secara implisit telah mengelompokkan sistem pendidikan nasional dalam tiga komponen, yaitu: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai moral, karakter, dan kepribadian masyarakat Indonesia; (2) menyiapkan lulusan pendidikan sebagai tenaga terdidik yang produktif baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha mandiri yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; dan (3) membentuk manusia Indonesia yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian bangsa dalam era persaingan dunia.

Kritik terhadap pendidikan umumnya menyoroti orientasinya yang sangat lemah terhadap tumbuh kembangnya nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Sumber-sumber masalah tersebut cukup banyak dan multidimensional, mulai dari birokrasi dalam pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum sekolah, proses pembelajaran, evaluasi belajar, hingga ukuran keberhasilannya. Terjadi dikotomisasi yang tak perlu dalam rancangan pendidikan, yaitu upaya memisahkan secara tegas antara "pendidikan intelektual" di satu pihak, dengan "pendidikan nilai" di lain pihak. Dikotomi ini menunjukkan "kekerdilan" dalam pemikiran, karena nilai moral bukanlah dimensi yang berbeda dari intelektual. Rancangan program yang seperti inilah yang ditengarai sebagai penyebab utama terjadinya krisis moral

dan karakter di kalangan peserta didik, lulusan, pendidik, bahkan pengelola pendidikan. Krisis moral dan karakter telah terjadi baik pada tingkatan individual maupun kolektif, yang tercermin dalam institusi pendidikan mulai dari tingkat makro hingga satuan pendidikan (Suryadi, 2014: 95)

Pendidikan sebagai wahana untuk memanusiakan manusia terikat oleh dua misi penting, yaitu *hominisasi* dan *humanisasi*. Sebagai proses hominisasi, pendidikan berkepentingan memposisikan manusia sebagai makhluk yang memiliki keserasian dengan habitat ekologi. Manusia diarahkan untuk mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis seperti makan, minum, pekerjaan, sandang, tempat tinggal, berkeluarga, dan kebutuhan biologis lainnya dengan cara-cara yang baik dan benar. Dalam proses hominisasi seperti itu, maka pendidikan dituntut untuk mampu mengarahkan manusia pada cara-cara pemilihan dan pemilahan nilai sesuai dengan kodrat biologis manusia.

Pendidikan sebagai proses humanisasi mengarahkan manusia untuk hidup sesuai dengan kaidah moral, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bermoral. Moral manusia berkaitan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dalam hal ini pendidikan seyogyanya tidak mereduksi proses pembelajarannya hanya semata-mata untuk kepentingan salah satu segi kemampuan saja, melainkan harus mampu menyeimbangkan kebutuhan moral dan intelektual sehingga kemandirian bangsa dapat terwujud.

Perwujudan kemandirian bangsa hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkeadilan. Pendidikan harus dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan nasional di berbagai bidang. Sebagai bagian integral dari suatu sistem perekonomian negara, pendidikan harus dapat menghasilkan tenaga terdidik yang cakap, kreatif, dan profesional agar menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Tenaga terdidik harus menjadi warga negara yang baik dan mencintai tanah air dan bangsanya agar

dapat memberikan kontribusi terhadap perwujudan kehidupan bangsa yang demokratis dan berkeadilan. Pembangunan pendidikan harus terpadu dan berjalan secara seirama, selaras, dan serasi dengan pembangunan pada bidang-bidang lainnya.

Secara konseptual pendidikan kewarganegaraan diartikan sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 (2) merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara dapat tercapai dengan baik.

Menurut Tim Diklat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan/ PKn (2008) Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian multi disiplin, yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Adapun aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Print (1999: 12) mempunyai pendapat bahwa isi dari Pendidikan Kewarganegaraan yang prinsip adalah hak dan tanggung jawab warga negara; pemerintahan dan lembaga-lembaga; **sejarah** dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum dan *rule of law*; hak asasi manusia, hak-hak politik, ekonomi dan sosial; proses dan prinsip-prinsip demokrasi; partisipasi aktif warga negara

dalam wacana kewarganegaraan, wawasan internasional, nilai-nilai dari kewarganegaraan yang demokratis.

b. Pendekatan *Student Active Learning* Dalam Pembelajaran PKn di Pendidikan Dasar dan Menengah Sebagai *Best Practise* Membentuk Karakter Warga negara Yang Baik

Dengan pendekatan *Student Active Learning*, peserta didik lebih banyak melakukan eksplorasi daripada secara pasif menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Kemudian daripada itu, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja, tetapi juga berkembang keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok, insiatif, berbagi informasi, dan penghargaan terhadap orang lain.

Menurut Supandi (2001), metode pendekatan *Student Active Learning* ini meliputi antara lain:

1. Model Good News Class Meeting

Menurut Winataputra, 2007, Pertemuan Kelas Berita Baru (*Good News Class Meeting*), merupakan model pembelajaran melalui pertemuan kelas guna membahas berita aktual, menarik untuk dipelajari dan bermakna bagi peserta didik yang ada di media massa seperti surat kabar, televisi, radio atau internet. Tujuan model pembelajaran ini adalah untuk membangun peserta didik akan rasa ingin tahu dan peka terhadap masalah aktual yang terjadi di lingkungannya.

2. Model Problem Solving Meeting

Pertemuan Pemecahan Masalah (*Problem Solving Meeting*), merupakan model pembelajaran melalui pertemuan terencana untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan daerah atau nasional yang menyangkut kehidupan peserta didik, seperti pemecahan masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik. Tujuan model pembelajaran ini peserta didik akan terlatih memecahkan masalah melalui langkah berpikir kritis dan kreatif.

3. Model Rule Setting Meeting

Pertemuan Legislasi (*Rule Setting Meeting*), merupakan model pembelajaran melalui pertemuan untuk merumuskan atau menyusun norma atau aturan yang akan berlaku di sekolah. Misalnya: kapan peserta didik boleh tidak memakai pakaian seragam sekolah satu hari dalam seminggu kemudian menuangkannya secara konsensus menjadi salah satu butir aturan dalam tata tertib sekolah. Tujuan model pembelajaran adalah salah satu cara ini peserta didik akan mampu berpikir normatif dan mematuhi tata tertib atau aturan yang sudah disepakati.

4. Model Pembelajaran Jigsaw

Model pembelajaran kooperatif teknik JIGSAW (Model Tim Ahli) dikemukakan oleh Aronson, Blanney, dan Stephen, Sikes dan Snapp, tahun 1978. Pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw adalah suatu pembelajaran kooperatif dimana dalam proses pembelajaran setiap peserta didik dalam kelompok disilang dan memperoleh tugas yang berbeda. Anggota kelompok yang memperoleh tugas sama dikumpulkan jadi satu dan membahas tugas tersebut (*kelompok kooperatif*). Tiap anggota setelah selesai mengerjakan harus kembali ke kelompok semula untuk menyampaikan hasil pembahasan (*ahli informasi*), sehingga kelompok pembahas kembali ke kelompok semula dengan membawa berbagai permasalahan yang berbeda untuk disampaikan kepada teman sejawat dalam kelompok.

5. Model Numbered Heads Together

Spencer Kagan, tahun 1992 mengembangkan pembelajaran kooperatif teknik *Number Head Together* (NHT) atau kepala bernomor. Artinya setiap peserta didik dalam berkelompok diberi kartu nomor, dan masing-masing peserta didik bernomor harus mempersiapkan diri untuk menyajikan tugas yang diberikan oleh guru dalam kelompoknya. Tujuannya adalah untuk membangun rasa tanggung jawab secara

individual maupun secara kelompok dan mengharuskan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga tidak ada istilah “ penumpang gelap “ dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Untuk menciptakan rasa tanggung jawab secara individu dalam kelompok cara yang dapat digunakan adalah dengan cara memberi kartu bernomor pada masing-masing peserta didik, dan setiap peserta didik harus berani menyampaikan apa yang telah dikerjakan dalam kelompoknya. Oleh karena itu setiap peserta didik harus aktif ikut serta dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kelompoknya.

6. Model *Think Pair and Share*

Frank Lyman, tahun 1985 telah mengembangkan pembelajaran kooperatif teknik *Think Paire and Sharre* (berpikir berpasangan dan curah pendapat). Model pembelajaran kooperatif dimana peserta didik dalam satu kelas dibagi dalam kelompok kecil (4-6 orang) atau lebih saling berpasangan untuk tukar pendapat serta saling membantu satu sama lain dalam rangka mencapai kompetensi yang ditetapkan. Tujuan model pembelajaran ini adalah (1) meningkatkan hasil belajar akademik, (2) meningkatkan kesadaran untuk menerima terhadap keragaman, (3) mampu meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan sosial.

Pembelajaran dengan *cooperative learning teknik think paire and share* akan memberikan manfaat bagi peserta didik dalam: (1) meningkatkan kemampuannya untuk bekerjasama dan bersosialisasi, (2) melatih kepekaan diri, empati melalui variasi perbedaan sikap laku selama bekerjasama, (3) upaya mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri, (3) meningkatkan iklim belajar yang lebih aktif dan membangun masyarakat belajar yang saling ketergantungan dan bekerjasama, (4) meningkatkan motivasi belajar, harga diri dan sikap-

laku yang positif, (5) memupuk rasa tanggung jawab baik individu maupun kelompok,

7. Model *Student Teams Achievment Divisions (STAD)*

Model *Student Teams Achivement Devissions* (STAD) atau Tim Belajar Peserta didik Berprestasi dikembangkan oleh *Slavin* tahun 1994. Di dalam kelompok belajar, pasti ada murid pandai dan kurang pandai atau peserta didik berprestasi dan kurang berprestasi. Menyadari kondisi seperti *Slavin* mengembangkan model pembelajaran, di mana tiap-tiap kelompok tim belajar terdapat peserta didik yang memiliki prestasi lebih dibanding dengan teman sejawatnya. Pembelajaran kooperatif teknik STAD adalah model pembelajaran kooperatif, dimana proses pembelajaran peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil (4-6) dimana di dalam kelompok peserta didik harus ada yang memiliki prestasi lebih. Sehingga dalam kelompok belajar di antara temannya saling bertukar pendapat, peserta didik yang merasa kurang, akan bisa belajar melalui teman sebaya dalam kelompok tersebut. Tujuan pembelajaran STAD adalah untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan dari peserta didik yang memiliki kemampuan lebih kepada peserta didik yang memiliki kemampuan kurang, sehingga timbul interaksi pembelajaran antar peserta didik dalam satu kelompok atau tutorial sebaya.

8. Model *Investigation Group*

Sharan tahun 1992 mengembangkan model pembelajaran kooperatif teknik investigasi kelompok dimaksudkan adalah proses pembelajaran dimana peserta didik di bagi dalam kelompok kecil dan masing-masing diberi tugas untuk menyelesaikannya. Peran serta anggota dikelompok dalam mengerjakan tugas dituntut secara tegas, sehingga semua anggota kelompok secara aktif turut secara

memecahkan permasalahan yang diberikan padanya. Oleh karena itu keberanian mengemukakan pendapat dan mempertahankan argumentasi menjadi kunci keberhasilan dalam bekerjasama. Tujuan Pembelajaran ini untuk membina sikap tanggung jawab dan bekerjasama dalam kelompok, dan membina sikap saling menghargai pendapat anggota kelompok serta membiasakan untuk berani mengemukakan pendapat

9. Model Cooperative Script

Dansereau, dkk, 1985 mengembangkan Model pembelajaran Cooperative Script: merupakan cara-cara belajar dimana peserta didik bekerjasama berpasang-pasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi pelajaran yang dipelajari. Tujuan pembelajaran *cooperatif script* adalah melatih peserta didik dalam membuat ikhtisar dari bagian materi yang dipelajarinya dan membina kerjasama dengan sesama teman dalam proses pembelajaran. Rasa tanggung jawab dengan sendirinya akan tumbuh, karena dituntut untuk bekerjasama membuat ikhtisar.

10. Model Make A Match.

Make a match (mencari pasangan) merupakan salah model pembelajaran kooperatif dimana peserta didik dituntut untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan kartu permasalahan yang diperoleh melalui undian secara bebas. Kartu-kartu ini dipersiapkan oleh guru. Pada prinsipnya peserta didik dalam kelas dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok yang memecahkan masalah dan kelompok yang membawa kartu soal. Tujuan dari model pembelajaran ini adalah untuk membina ketrampilan menemukan informasi dan kerjasama dengan orang lain serta membina tanggung jawab untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui kartu permasalahan, maka Lorna Curran, tahun 1994 mengembangkan model

pembelajaran kooperatif teknik "*make a match*" atau mencari pasangan.

11. Model Debate

Model pembelajaran debat merupakan cara pembelajaran dimana peserta didik secara kelompok ataupun individual mengemukakan ide-ide pemecahan suatu masalah. Sedangkan kelompok kontra merespon ide-ide yang dikemukakan oleh kelompok penggagas. Setelah mendapat respon secara kontradiktif, kelompok pengas ide mempertahankan hingga mencapai titik temu. Tujuan model pembelajaran debat adalah dalam rangka mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat dan mempertahankan pendapatnya serta membina tanggung jawab dalam kebersamaan dalam mempertahankan ide-ide/gagasannya perlu dibelajarkan model pembelajaran debat.

12. Model Role Playing

Model pembelajaran Role Playing adalah model pembelajaran yang lebih mengutamakan pemeranan peserta didik dalam suatu pelakonan, sehingga sikap emosional dan karakteristik si pelaku dalam memerankan pelakonan menjadi pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu sebelum model pembelajaran ini diterapkan, sebaiknya para pemeran, terlebih dulu melakukan pelatihan-pelatihan. Tujuan model pembelajaran Role playing atau bermain peran, adalah dalam rangka membina tanggung jawab individu sebagai pemeran, dan membina tanggung jawab bersama dalam memerankan pelakonan serta membina sikap emosional atau karakter peserta didik dalam memerankan pelakonan

13. Model Think Paire Share And Talking Chip

Model pembelajaran ini hampir sama dengan *think pair and share*, bedanya terletak pada masing-masing pasangan membawa kartu permasalahan dan pemecahan

masalah dilakukan di balik kartu. Model pembelajaran berpikir berpasangan dan curah pendapat melalui kartu bicara bertujuan untuk membina ketrampilan berpikir dan bekerjasama dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya melalui kartu-kartu bicara.

Pilihan terhadap metode sebagaimana diuraikan di atas sangat tergantung pada kebutuhan dari capaian pembelajarannya. Kesiapan guru, sarana, prasarana yang ada pada masing-masing sekolah, termasuk kondisi peserta didik, juga perlu dipertimbangkan demi suksesnya pembelajaran.

B. Penutup

Pentingnya masalah pembentukan karakter warganegara sebagai karakter bangsa merupakan suatu masalah yang mendasar yang memerlukan penanganan serius dan tuntas dan ini merupakan tugas yang harus dilakukan bersama oleh berbagai kalangan. Pendidikan sebagai sarana perubahan perilaku harus mampu membentuk karakter warganegara dalam setiap kegiatannya.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai bagian dari upaya membangun bangsa sekaligus membangun karakter warga negara-bangsa merupakan wahana internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, sehingga bagi mahasiswa dapat diperoleh hal-hal berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan kehendak dan watak dan hati nurani.

Pembelajaran ini ke depannya harus dapat menjadi wahana pendidikan karakter bangsa yang bertujuan membentuk warganegara yang *'smart and good citizen'*, yaitu warganegara yang baik dan cerdas secara komprehensif (intelektual, spritual, emosional, sosial, dan kinertetik) serta mesti menjadi sumber nilai dan pedoman dalam mengantarkan peserta didik mengembangkan kepribadiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Noor Syam, M. (2006). *Filsafat Ilmu*. Malang: FKIP UM.

Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (KNPKB) Tahun 2010-2025*. Jakarta: Pemerintah RI.

Soedarsono, S. (2002). *Character Building: Membentuk Watak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Soedarsono, S. (2009). *Karakter Mengatur Bangsa dari Gelap Menuju Terang, Karakter Mendorong Kita Hidup Dalam Kebahagiaan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Supandi. (2001). *Model Pembelajaran*. Disajikan Pada Latihan Kerja Instruktur Nasional PKn Pada Dirjen Dikdasmen Kemdikbud 1994-2001.

Wahab, A. Aziz. (2004). *Pembangunan Karakter dan Bangsa Sebagai Upaya Bersama*. (Makalah). Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Nasionalisme Indonesia Menuju "Character and Nation Building" Kerjasama LEMHANAS RI dan UNJ, Jakarta: 18 Mei 2004.